

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN (DBH, DAU, & DAK)
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
SULAWESI SELATAN**

Suranto

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
E-mail: Rantoinnocent76@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) on South Sulawesi's GRDP. This study uses a quantitative research design, namely research that seeks the relationship or influence between one variable and one or more other variables in terms of analyzing the effect of balancing funds on GRDP in South Sulawesi. The sample in this study looked at the budget realization reports of the Provincial Government and Regional Government of South Sulawesi Districts/Cities as well as South Sulawesi's GRDP data for 2010 to 2020. The results showed that DBH partially did not have a significant effect on South Sulawesi's GRDP. Partially, DAU has no significant effect on South Sulawesi's GRDP. Partially, DAK has no significant effect on South Sulawesi's GRDP. Meanwhile, DAU, DBH, and DAK simultaneously have a significant effect on South Sulawesi's GRDP. Furthermore, the amount of simultaneous influence is 92,6%, while the remaining 7,4% is determined by other factors not beyond this study.

Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Gross Regional Domestic Product

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yakni penelitian yang mencari hubungan atau pengaruh antar satu variabel dengan atau terhadap satu atau lebih variabel lainnya dalam hal menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Sampel dalam penelitian ini dengan melihat pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota Sulawesi Selatan serta data PDRB Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Secara parsial DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Secara parsial DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. DAU, DBH, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Dan besarnya pengaruh secara simultan sebesar 92,6%, selebihnya sebesar 7,4% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto

1. PENDAHULUAN

Untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi di suatu daerah, pembangunan daerah melibatkan pengelolaan sumber daya yang ada oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta pembentukan pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta (Arsyad, 2010; Edelia & Aslami, 2022). Untuk mencapai tujuan dari pembangunan daerah perlu diberdayakan seluruh kemampuan daerah, salah satunya kemampuan finansial keuangan daerah (APBD).

Dalam hal pertumbuhan ekonomi daerah, tujuan pembangunan tidak jauh berbeda dengan tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, regionalisasi proses pembangunan jauh lebih bernuansa (Tambunan, 2003). Produk regional bruto (PDRB) sering digunakan sebagai proksi untuk kesehatan ekonomi suatu wilayah karena memberikan wawasan tentang keseluruhan kinerja ekonomi wilayah tersebut. Perubahan struktur ekonomi, serta tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita, merupakan ukuran lain (Sjafrizal, 2008). Pertumbuhan produk domestik bruto riil (harga konstan) di Sulawesi Selatan sangat konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 PDRB Sulawesi Selatan sebesar Rp. 171.740,74 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp. 185.708,47 milyar, dan tahun 2012 sebesar Rp. 202.184,59 milyar. Sementara pada tahun 2014 PDRB Sulawesi Selatan mencapai Rp. 233.988,05 milyar pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 250.802,99 milyar. PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 269.401,31 milyar, tahun 2017 sebesar Rp. 288.814,17, tahun 2018 sebesar Rp. 309.156,19, tahun 2019 sebesar 330.506,38 milyar, dan tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 328.154,57 (BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2022).

Dari data produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tersebut maka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan terlihat jelas pada tahun 2011 sebesar 8,13% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 8,87%. Namun pada tahun 2013 s.d 2018 naik di kisaran 7% dengan rincian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 7,62%, tahun 2014 sebesar 7,54%, tahun 2015 sebesar 7,19%, tahun 2016 sebesar 7,21%, tahun 2017 sebesar 7,21%, dan tahun 2018 sebesar 7,04%. Tahun 2019 turun menjadi 6,91% dan bahkan tahun 2020 kontraksi menjadi -0,71%.

Gambaran penerimaan dana perimbangan Sulawesi Selatan dari tahun 2010 - 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut. Penerimaan dana perimbangan pada tahun 2010 sebesar Rp. 11.404,06 milyar. Pada periode tahun 2010 s.d 2015 secara umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan utk tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 18,63%, tahun 2013 sebesar 12,98% dan bahkan pada tahun 2016 peningkatan mencapai 34,51%. Sementara pada periode tahun 2017 s.d 2019 penerimaan cenderung stabil, hanya mengalami peningkatan 0,91% s.d 2,26%. Dan khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan -7,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya dana perimbangan jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pendapatan daerah dari tahun 2010 s.d 2020 juga masih sangat besar persentasenya yang diatas 60%. Dari tahun 2010 s.d 2016 prosentase tersebut berfluktuasi antara 60,60% hingga 71,15%. Dan pada tahun 2016 hingga 2020 grafik menunjukkan penurunan, dari 71,15% pada tahun 2016 ke 63,66% tahun 2022. Pada dasarnya dana perimbangan merupakan penyokong utama pendapatan daerah di Sulawesi Selatan.

Dari dua gambaran data diatas antara perkembangan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta perkembangan dari PDRB atas dasar harga konstan dapat dijadikan sebagai

bahan analisa. Dana perimbangan dari tahun 2010 s.d 2016 meningkat tajam, demikian juga untuk perkembangan atau peningkatan PDRB. Peningkatan PDRB meningkat lebih tajam dibandingkan dana perimbangan. Sementara pada tahun 2017 s.d 2019 dana perimbangan cenderung stabil, namun yang terjadi pada PDRB pada tahun yang sama tetap meningkat tajam. Sementara pada tahun 2020 dana perimbangan turun, demikian juga terjadi penurunan PDRB (namun perlu dicatat pada tahun 2020 wabah pandemi telah menyebar di Indonesia). Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa apakah dana perimbangan Sulawesi Selatan berpengaruh terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK)

Penunjang pelaksanaan kekuasaan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan desentralisasi, termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, adalah Dana Perimbangan yang diperoleh dari APBN (Widjaja dalam (Putra, 2016)). Sebagai akibat dari kesenjangan anggaran antara pemerintah federal dan negara bagian dan kotamadya, pemerintah daerah di Indonesia bergantung pada pendanaan federal hingga lebih dari 70%, kecuali Provinsi DKI Jakarta (Elmi, 2002).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dana alokasi umum (DAU) “adalah uang yang diperoleh dari APBN yang disalurkan dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi secara berkeadilan.” DAU dihitung dengan menambahkan alokasi dasar pada celah fiskal, dimana celah fiskal adalah selisih antara kewajiban keuangan pemerintah dengan pendapatannya. Alokasi dasar ditentukan dengan proporsi tetap dari gaji pokok pegawai pemerintah daerah. Diukur dengan jumlah penduduk, luas lahan, indeks biaya bangunan, indeks pembangunan manusia, dan produk regional bruto per penduduk, tuntutan fiskal merupakan kebutuhan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pelayanan dasar umum. Pendapatan daerah, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam semuanya berkontribusi pada "kapasitas fiskal" kawasan, atau kemampuannya untuk mengumpulkan uang.

Sumber penerimaan dari pajak dirinci sebagai berikut: Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, pendapatan dari sumber daya alam dipecah menjadi banyak kategori, termasuk minyak dan gas, pertambangan pada umumnya, penebangan kayu, dan perikanan. Peraturan Pemerintah No. 115 Tahun 2000 menetapkan komponen pajak penghasilan daerah sebesar 20% baik untuk pajak penghasilan orang pribadi Pasal 21 maupun pajak penghasilan usaha Pasal 25/29. Delapan persen dianggap sebagai wilayah provinsi, sedangkan sisanya 12 persen dianggap sebagai wilayah kabupaten/kota, dengan total 20 persen. Atas usul gubernur, dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam rangka pemerataan, diatur porsi pendapatan pemerintah daerah yang dialokasikan ke masing-masing kabupaten/kota.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB adalah nilai pasar dari semua produk dan jasa akhir yang dikembangkan atau diproduksi di dalam perbatasan suatu negara dalam periode akuntansi tertentu, terlepas dari apakah produsennya adalah warga negara atau warga negara asing. Dengan menggunakan metodologi produksi, pengeluaran, dan pendapatan, yang diberikan baik pada harga pasar maupun harga konstan (riil), PDRB dapat disusun dengan 3 (tiga) cara. Produk domestik regional bruto (PDRB) dengan harga pasar (PDRB nominal) dihitung dengan menggunakan harga pasar rata-rata barang dan jasa selama periode perhitungan. Namun, PDRB atas dasar harga konstan (riil) dihitung menggunakan harga tahun dasar dan digunakan untuk mengukur ekspansi ekonomi (BPS Sulsel: 2019).

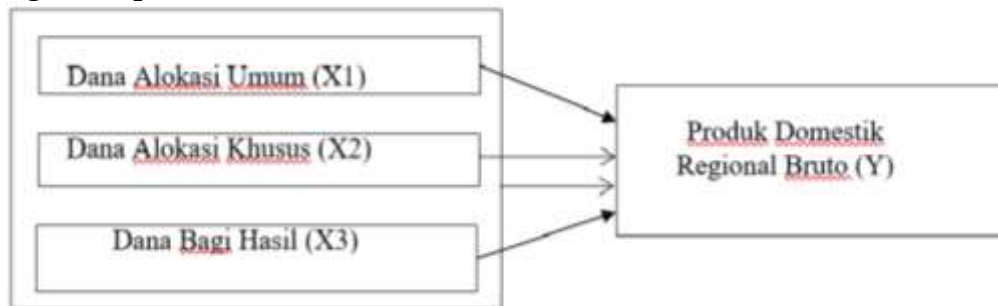
Peningkatan output ekonomi suatu negara dalam jangka panjang, yang memungkinkannya memenuhi kebutuhan material rakyatnya, adalah apa yang kita sebut pertumbuhan ekonomi (Kuznets, 2019). Sederhananya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produksi barang dan jasa serta kesejahteraan secara keseluruhan yang dihasilkan dari perkembangan tersebut (Untoro, 2010). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah variabel ekonomi makro antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, FDI, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), belanja pemerintah daerah (LGE), dan tenaga kerja (Mulia, 2010).

2.3. Kajian Empiris

Beberapa studi sebelumnya yang terkait disediakan untuk digunakan dalam analisis penelitian ini karena mereka berkontribusi pada teori dan mendukung temuan penelitian ini.

Dilaporkan pada tahun 2017 oleh Dodi Chandra, Syurya Hidayat, dan Rosmeli bahwa dana perimbangan memberikan efek positif dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi (Chandra et al., 2017). Namun, ada sisi negatif dari mempertahankan paritas fiskal, dan akibatnya adalah ketimpangan regional yang semakin parah. Menurut Zulfa Eliza, Said Muhammad, dan Muhamad Nasir (2014), PDRB Riil didorong oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan PDRB Riil tidak terpengaruh oleh Dana Alokasi Khusus (hasil estimasi tidak signifikan). Menurut Yozi Aulia Rahman dan Ayunda Lintang Chamelia (2015), PDRB di Jawa Tengah dipengaruhi oleh tabungan, kredit, investasi swasta, dan pengeluaran pemerintah sekaligus. Tingkat pertumbuhan pendapatan riil disposabel (PDRB) di Jawa Tengah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat tabungan pribadi. Di Jawa Tengah, ekspansi kredit berdampak konstruktif dan substansial terhadap pertumbuhan PDB. Terdapat korelasi yang menguntungkan meskipun tidak signifikan antara Realisasi PDRB dan PAD dengan Realisasi Belanja Daerah di Jawa Tengah. Aulia Afafun Nisa (2017), mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Turunkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Secara Signifikan Tahun 2011-2015; DAU berdampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015; dan Bagi Hasil Perpajakan berdampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

2.4. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

Hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan.
2. Dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan.
3. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan.
4. Dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif dengan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda (Sugiyono, 2017). Tahap pertama akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Lokasi penelitian ditetapkan di Sulawesi Selatan. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena dalam beberapa tahun terakhir produk domestik regional bruto naik cukup signifikan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan justru lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2022.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dan produk domestik regional bruto seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan. Obyeknya berupa data laporan realisasi anggaran dan dana perimbangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan tahun 2010-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu keseluruhan dari populasi.

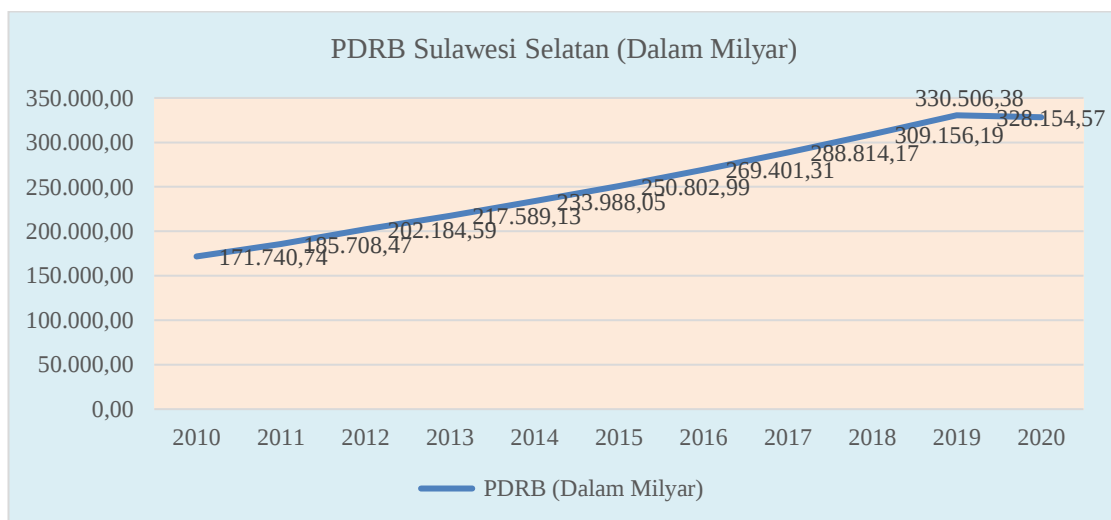
Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar tahun 2010-2020.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

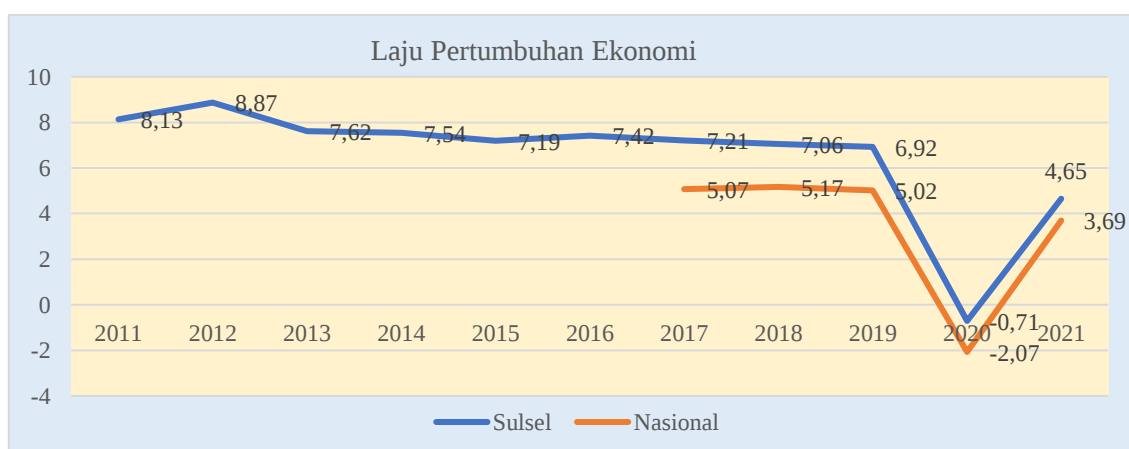
4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

PDRB dengan harga pasar (PDRB nominal) dihitung dengan menggunakan harga pasar rata-rata barang dan jasa selama periode perhitungan. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (riil) dihasilkan dengan menggunakan harga tahun dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan tahun dasar tahun 2010, tabel berikut merinci PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018.



Gambar 1. PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan tahun 2010-2020 PDRB ADHK (Dalam Milyar)

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa PDRB Sulawesi Selatan dari tahun 2010 s.d 2019 selalu mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Dengan begitu dapat disimpulkan bagaimana laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 s.d 2020 dengan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional sebagaimana dalam grafik sebagai berikut :

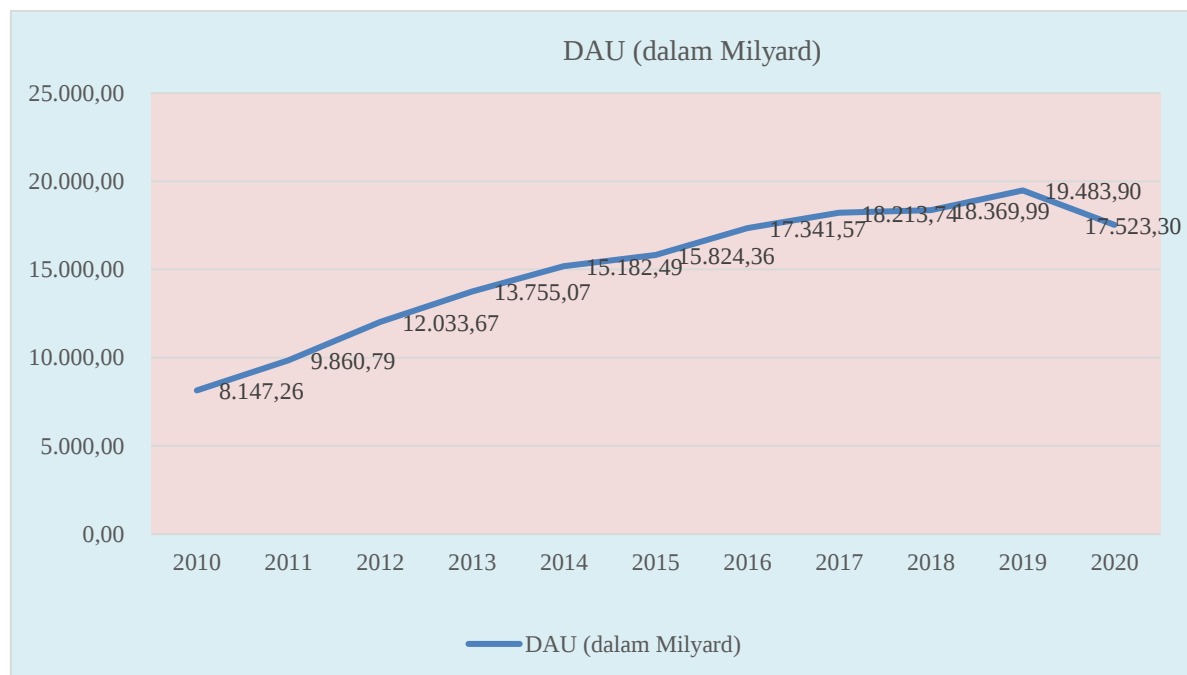


Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2021

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dari tahun 2011 s.d 2021 seperti pada tabel diatas. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 8,13% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 8,87%. Namun pada tahun 2013 s.d 2018 naik di kisaran 7% dengan perincian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 7.62%, tahun 2014 sebesar 7,54%, tahun 2015 sebesar 7,19%, tahun 2016 sebesar 7,21%, tahun 2017 sebesar 7,21%, dan tahun 2018 sebesar 7,04%. Tahun 2019 turun menjadi 6,91% dan bahkan tahun 2020 kontraksi menjadi -0,71%. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dan mempunyai trend yang sama.

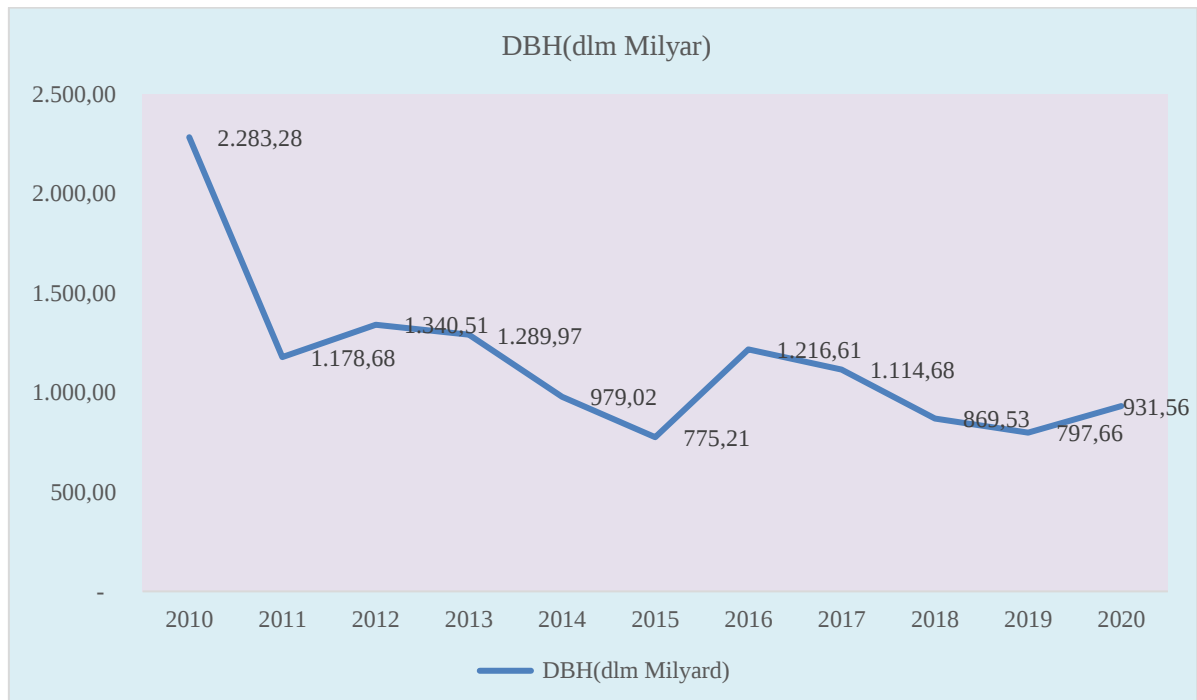
4.1.2. Dana Perimbangan Sulawesi Selatan

Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK). Dan berikut data dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dari tahun 2010 s.d 2020 :



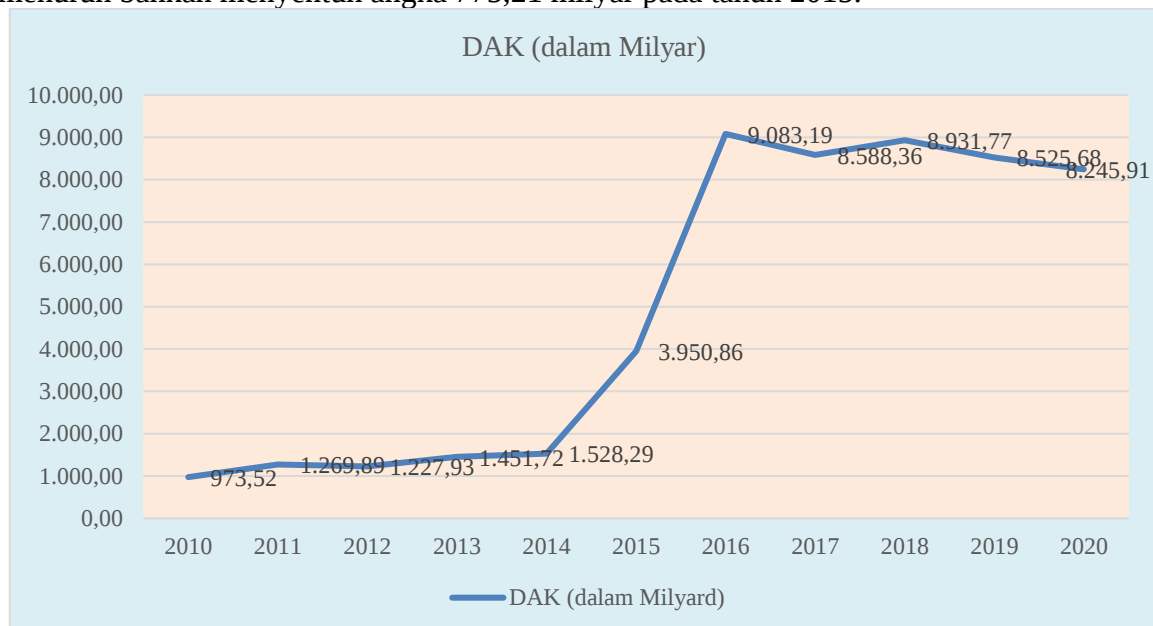
Gambar 3. DAU Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar)

Melihat grafik diatas bahwa penerimaan DAU wilayah Sulawesi Selatan, penerimaan DAU pada tahun 2010 sebesar 8.147,26 milyar. Penerimaan DAU Sulawesi Selatan secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2010 s.d 2015 meningkat stabil diatas 10%, sementara pada tahun 2016 s.d 2019 meningkat namun dibawah 10%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,06%.



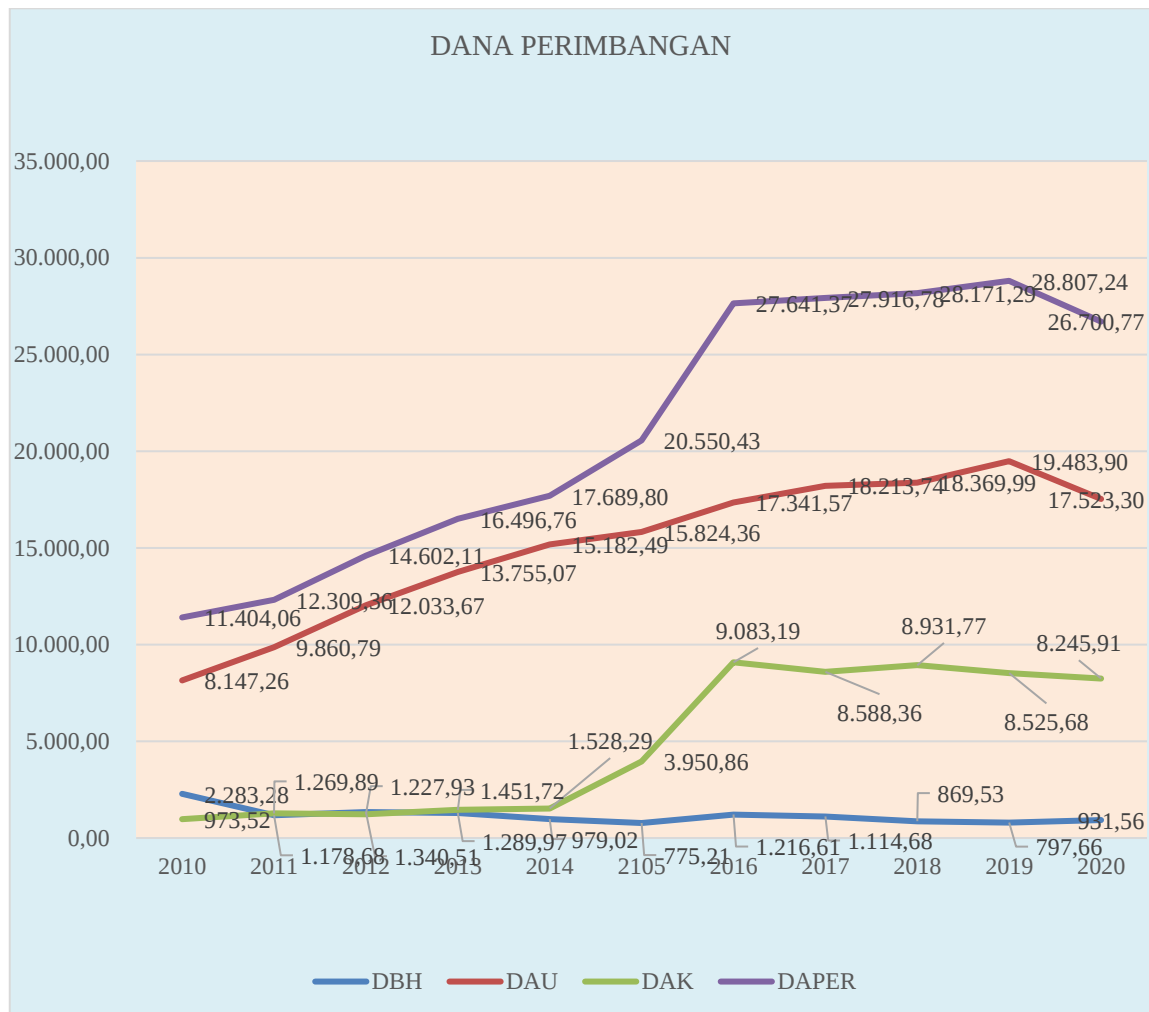
Gambar 4. DBH Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar)

Melihat grafik penerimaan DBH hasil untuk wilayah Sulawesi Selatan ternyata tidak mengalami peningkatan, tinggi pada tahun 2010 mencapai Rp 2.283,28 milyar kemudian pada tahun 2011 turun jaun menjadi 1.178,68 milyar. Dan untuk tahun setelahnya cenderung menurun bahkan menyentuh angka 775,21 milyar pada tahun 2015.



Gambar 5. DAK Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar)

Penerimaan DAK untuk wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2010 sebesar Rp. 973,52 milyar. Dari tahun 2010 s.d 2014 mengalami peningkatan yang pada tahun 2014 mencapai penerimaan sebesar Rp 1.528,29 milyar. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2015 sebesar 157,52% menjadi Rp 3.950,86 milyar. Dan pada tahun 2016 meningkat tajam lagi sebesar 129,90% menjadi Rp 9.083,19 milyar. Sementara di tahun 2017 s.d 2020 stabil dikisaran 8.000 an milyar.



Gambar 6. Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar)

Gambaran penerimaan dana perimbangan Sulawesi Selatan dari tahun 2010 - 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut. Penerimaan dana perimbangan pada tahun 2010 sebesar Rp. 11.404,06 milyar. Pada periode tahun 2010 s.d 2015 secara umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan utk tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 18,63%, tahun 2013 sebesar 12,98% dan bahkan pada tahun 2016 peningkatan mencapai 34,51%. Sementara pada periode tahun 2017 s.d 2019 penerimaan cenderung stabil, hanya mengalami peningkatan 0,91% s.d 2,26%. Dan khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan -7,31% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada grafik diatas terlihat bahwa komposisi utama dari dana perimbangan adalah DAU. Kemudian peningkatan dana perimbangan pada tahun 2016 ternyata akibat dari meningkatan DAK khusus yang meningkat diatas 129,90%.

Tabel 1. Dana perimbangan dan PDRB Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar rupiah)

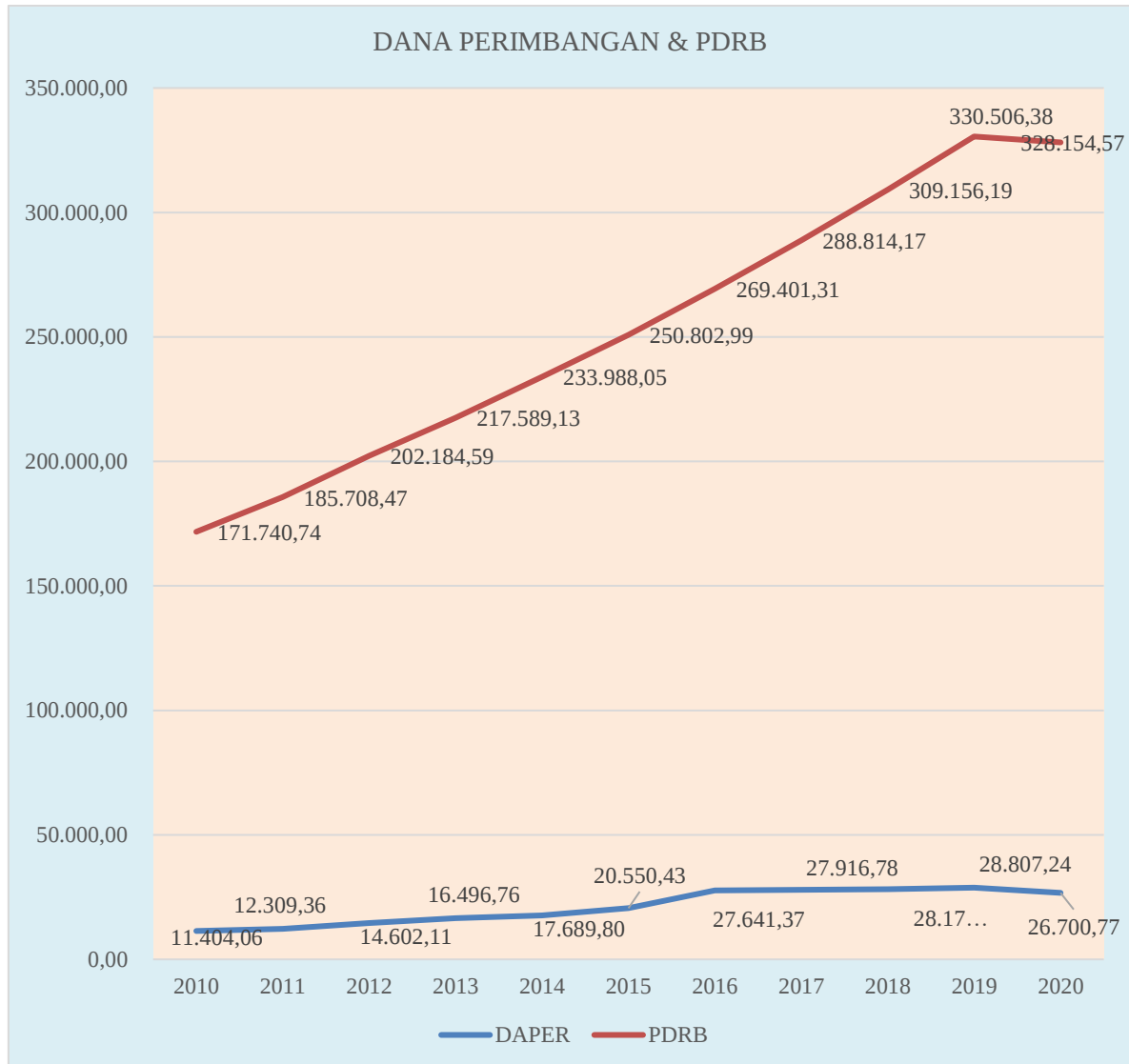
Tahun	DBH	DAU	DAK	DANA PERIMBANGAN	PENDAPATAN DAERAH	PDRB ADHK
2010	2,283.28	8,147.26	973.52	11,404.06	16,062.18	171,740.74
2011	1,178.68	9,860.79	1,269.89	12,309.36	19,463.02	185,708.47
2012	1,340.51	12,033.67	1,227.93	14,602.11	21,858.47	202,184.59
2013	1,289.97	13,755.07	1,451.72	16,496.76	25,152.43	217,589.13
2014	979.02	15,182.49	1,528.29	17,689.80	28,701.33	233,988.05
2015	775.21	15,824.36	3,950.86	20,550.43	33,913.75	250,802.99
2016	1,216.61	17,341.57	9,083.19	27,641.37	38,851.93	269,401.31
2017	1,114.68	18,213.74	8,588.36	27,916.78	40,471.59	288,814.17
2018	869.53	18,369.99	8,931.77	28,171.29	41,416.57	309,156.19
2019	797.66	19,483.90	8,525.68	28,807.24	43,542.99	330,506.38
2020	931.56	17,523.30	8,245.91	26,700.77	41,945.23	328,154.57



Gambar 7. Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2010-2020

Melihat grafik diatas bahwa ketergantungan pemerintah daerah Sulawesi Selatan terhadap dana perimbangan masih tinggi, dimana dari tahun 2010 s.d 2020 persentase dana perimbangan sebagai sumber penerimaan masih diatas 60%, bahkan pad tahun 2010 dan

2016 mencapai 71%. Namun perlu dicatat juga bahwa mulai tahun 2016 s.d 2020 persentase tersebut mulai menurun, sehingga penerimaan diluar dana perimbangan telah meningkat dalam lima tahun tersebut secara baik.



Gambar 8. Dana Perimbangan dan PDRB Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2010 s.d 2020 (dalam milyar)

Melihat grafik perbandingan antara dana perimbangan dan PDRB di Sulawesi Selatan terlihat meningkat dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020. Namun peningkatan tersebut juga terlihat bahwa peningkatan dana perimbangan tidak setajam peningkatan PDRB. Maka akan timbul pertanyaan apakah dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Selatan.

4.1.3. Uji Hipotesis

1) Uji Hipotesis Yang Pertama

Koefisien Korelasi Hipotesis Pertama, Kedua, Ketiga

Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi pada tabel diatas, variable DBH diperoleh nilai $t_{hitung} = 0.518 < T_{tabel} 2,36462$, signifikan pada $p = 0,620 > 0,05$. Ini berarti bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan dana bagi hasil terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi hipotesis yang pertama terlihat pada tabel di atas diperoleh bahwa koefisien korelasi dana bagi hasil dengan produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan adalah 0,192 dengan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,03686. Dengan kata lain, 3,69% produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor dana bagi hasil, ketika dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dinyatakan konstan/tetap.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a										
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics
Model		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance VIF
1	(Constant)	124080.548	85874.315		1.445	.192				
	DBH	-13.176	25.426	-.098	-.518	.620	-.695	-.192	-.053	.295 3.391
	DAU	7.478	4.958	.494	1.508	.175	.943	.495	.155	.099 10.080
	DAK	6.547	3.646	.432	1.796	.116	.908	.562	.185	.184 5.447

a. Dependent Variable: PDRB

2) Uji Hipotesis Yang Kedua

Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi pada tabel diatas, variable DAU diperoleh nilai $t_{hitung} = 1.508 < T_{tabel} 2,36462$, signifikan pada $p = 0,175 > 0,05$. Ini berarti bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan dana alokasi umum terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi hipotesis yang kedua terlihat pada tabel di atas diperoleh bahwa koefisien korelasi DAU dengan produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan adalah 0,495 dengan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,245025. Artinya, 24,50% produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor dana bagi hasil, ketika dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dinyatakan konstan/tetap.

3) Uji Hipotesis Yang Ketiga

Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi pada tabel diatas, variable DAK diperoleh nilai $t_{hitung} = 1.796 < T_{tabel} 2,36462$, signifikan pada $p = 0,116 > 0,05$. Ini berarti bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan dana alokasi khusus terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi hipotesis yang kedua terlihat pada tabel di atas diperoleh bahwa koefisien korelasi DAK dengan produk

domestik regional bruto Sulawesi Selatan adalah 0,562 dengan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,315844. Demikian, 31,58% produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor dana alokasi khusus, ketika dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dinyatakan konstan/tetap.

4) Uji Hipotesis Keempat

Berdasarkan perhitungan besarnya koefisien korelasi pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.962 ^a	.926	.894	18346.59726	.926	29.051	3	7	.000	.672

a. Predictors: (Constant), DAK, DBH, DAU

b. Dependent Variable: PDRB

Berdasarkan tabel diatas yang menyatakan “tingkat keeratan hubungan dan pengaruh antara DBH, DAU, dan DAK terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan sebesar 0,962 dengan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,926. Hal ini berarti bahwa 92,6% tinggi rendahnya produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor penerimaan DAU, DBH, dan DAK, selebihnya sebesar 7,4% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Faktor lain tersebut misalkan konsumsi rumah tangga, investasi, net ekspor, inovasi, PAD, dan lainnya. Sedangkan hasil uji keberartian regresi menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} = 29,051 > F_{table} 4.07$ signifikan pada $p = 0,000 < 0,05$ berarti ada korelasi yang signifikan antara DBH, DAU, dan DAK terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan dapat diterima pada penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Dalam periode tahun 2010 sampai dengan 2020 di Sulawesi Selatan kucuran dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lingkup Sulawesi Selatan rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020 dana perimbangan sebesar Rp. 11.404,06 milyar dan terus meningkat sampai Rp. 28.807,24 milyar pada tahun 2019, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 26.700,77 milyar. Dana perimbangan jika dibandingkan dengan pendapatan daerah di Sulawesi Selatan, masih merupakan komponen utama dalam pendapatan daerah yang mencapai 60% hingga 71%. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap dana perimbangan masih tinggi. Namun perlu disyukuri juga bahwa trend ketergantungan tersebut di wilayah Sulawesi Selatan mempunyai trend yang menurun khususnya pada tahun 2016 hingga 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah mengalami pergerakan kearah yang positif.

Dari komposisi dana perimbangan yaitu DBH, DAU, dan DAK, maka DAU mempunyai persentase yang paling tinggi yaitu 71,35% disusul DAK 23,15%, dan DBH 5,50%. Dan tercatat bahwa peningkatan dana perimbangan pada tahun 2010 s.d 2020 sangat dipengaruhi oleh peningkatan DAU dan DAK. Untuk peningkatan DAU sangat stabil dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Semenatar penerimaan DAK

mempunyai trend yang berbeda, tahun 2010 s.d 2014 cenderung konstan, dan tahun 2015 s.d 2016 meningkat tajam, dan kembali konstan lagi di tahun-tahun berikutnya, yang pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 17.523,30 milyar. Jika melihat grafik DBH maka dari tahun 2020 s.d 2020 tidak ada peningkatan yang berarti, bahkan bisa disimpulkan cenderung menurun. Hal ini perlu dicermati khusus bagi pengambil kebijakan, perlu upaya untuk menggali potensi-potensi DBH seperti DBH pph ps. 21, DBH sumber daya alam, atau DBH lainnya.

Dalam penelitian juga didapatkan data bahwa peningkatan PDRB di Sulawesi Selatan yang digambarkan dengan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 s.d 2020 mempunyai angka masih diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan dari PDRB atas dasar harga konstan ini yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Namun perlu dicatat walau diatas pertumbuhan ekonomi nasional, tahun 2011 dan 2018 diangka 8%, tahun 2013 s.d 2018 di 7%, kemudian tahun 2019 turun ke angka 6%, tahun 2020 menurun lagi di -0,71% (dampak dari pandemic covid-19) tahun 2021 baru mulai naik lagi di angka 4,65%. Dari data yang didapatkan bahwa tahun 2010 s.d 2020 dana perimbangan meningkat, PDRB meningkat, namun laju pertumbuhan ekonomi konstan di 7%.

Dalam hasil uji hipotesis penelitian dihasilkan bahwa Dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Dana bagi hasil, Dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Dari hasil tersebut tergambar jelas begitu pentingnya peranan dana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) terhadap PDRB di Sulawesi Selatan yang mempunyai nilai pengaruh secara simultan sebesar 96,2%.

Implikasi dengan teori yang pernah dikemukakan oleh Keynes (Keynesian Revolution) bahwa melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah dapat menstimulus ekonomi dan membantu menjaga produksi dan pekerjaan setinggi-tingginya (Klein, 2016). Pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih (ekspor-impor). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan sebagai salah satu kebijakan fiskal, dan sebagai sumber untuk pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung teori Keynes (Keynesian Revolution).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan. Dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan.

Adapun saran berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas bahwa: Secara akademis penelitian ini perlu ditindaklanjuti oleh peneliti lain dengan melakukan penelitian menggunakan variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap PDRB ataupun

pertumbuhan ekonomi. Secara praktis : a) Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan perlu menggali potensi-potensi terkait DBH termasuk potensi pph 21, sumber daya alam, dan potensi DBH lainnya. b) Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan perlu peningkatan variabel lain selain dana perimbangan dalam upaya peningkatan produk domestik regional bruto. Karena dari penelitian ini walaupun dana perimbangan mengalami peningkatan (khususnya DAU dan DAK), dan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan, namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi diatas 60%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ikhtisar teori dan Soal Jawab Ekonomi Mikro (Edisi 1)*. BPFE.
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 67–76.
- Edelia, A., & Aslami, N. (2022). The Role Of Empowerment Of The Cooperative And MSME Office In The Development Of Small And Medium Micro Enterprises In Medan City. *MARGINAL : Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues*, 1(3), 31–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/marginal.v1i3.163>
- Eliza, Z., Muhammad, S., & Nasir, M. (2014). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan PDRB Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(1).
- Elmi, B. (2002). *Keuangan pemerintah daerah otonom di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Klein, L. R. (2016). *The keynesian revolution*. Springer.
- Kuznets, S. (2019). Economic growth and income inequality. In *The gap between rich and poor* (pp. 25–37). Routledge.
- Mulia, N. (2010). *Ekonomi Moneter : Uang dan Bank*. Djambatan.
- Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(2), 203–214.
- Putra, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 3(1).
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi pdrb kabupaten/kota jawa tengah tahun 2008-2012. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 8(1).
- Sjafrizal. (2008). *Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. LP3ES.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Tambunan, T. (2003). *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Untoro, J. (2010). *Ekonomi Makro*. Kawah Media.